



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120  
Telepon: (021) 8591 0031 (*Hunting*), Faksimile: (021) 8591 0030  
email: [humas@bpkp.go.id](mailto:humas@bpkp.go.id), website: [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

Nomor : OT.04/LP-858/SU04/3/2023 29 September 2023  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Kinerja Biro Hukum dan  
Komunikasi Triwulan III Tahun 2023

Yth. Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Laksana  
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan  
III tahun 2023 sebagai berikut.

## A. TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Target kinerja periode jangka menengah Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2020-2024 ditetapkan dalam Peraturan BPKP nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPKP. Target kinerja tersebut disajikan dalam tabel 1 yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target per tahun sepanjang periode Renstra dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 1 - Target Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi 2020-2024**

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Tahunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB	Indeks (Skala 1-5)	3,15	3,15	3,16	3,16	3,17
2	Meningkatnya Reputasi BPKP	Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	70	72	74	76	78
3	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi (1)	Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,68	8,69	8,69	8,71	8,72
4	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP (2)	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Persen	n/a	70	70	70	70

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Tahunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5				
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan (3)	Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100

- (1) Target IKK Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi” tahun 2023 pada Renstra BPKP adalah 8,71.
- (2) Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP” merupakan Sasaran Kegiatan yang baru ditambahkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021, sehingga tidak terdapat dalam Renstra BPKP 2020-2024. Untuk mengakomodasi sasaran kegiatan baru tersebut, target tahun 2021 s.d. 2024 ditetapkan sebesar 70%.
- (3) Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan” merupakan Sasaran Kegiatan yang baru ditambahkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak terdapat dalam Renstra BPKP 2020-2024. Untuk mengakomodasi sasaran kegiatan baru tersebut, target tahun 2023 s.d. 2024 ditetapkan sebesar 100%.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Target kinerja Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel 2 berikut.

**Tabel 2 - Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1.1 Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan	Indeks (Skala 1-5)	3,16
2	Meningkatnya Reputasi BPKP	2.1 Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	76
3	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	3.1 Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,71
4	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	4.1 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Persen	70 1)
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan (2)	5.1 Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP	Persen	100

Dari data di atas, terdapat dua target Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2023 yang berbeda dari target dalam Renstra/yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

- (1) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan (target Perkin 2023 sebesar 70%) baru ada di tahun 2022.
- (2) Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP (target Perkin 2023 sebesar 100%) baru ada di tahun 2023.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Komunikasi, target kinerja yang digunakan adalah target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, target Renstra disesuaikan mengikuti target Perjanjian Kinerja 2023.

## C. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Biro Hukum dan Komunikasi memiliki lima sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan lima indikator kinerja kegiatan (IKK) guna mengukur kinerja Biro. Pada triwulan III tahun 2023, satu capaian indikator kinerja menggunakan data periode sebelumnya, sedangkan empat sisanya belum tersedia datanya. Pada triwulan III tahun 2023, target, realisasi dan capaian kinerja kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3 – Capaian Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Kegiatan			
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4		
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1	Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB	Skala 1-5	3,16	4,44	140,51
2	Meningkatnya Reputasi BPKP	1	Indeks Reputasi BPKP	Skala 1-100	76	N/A	N/A
3	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	1	Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Skala 1-10	8,71	N/A	N/A
4	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	1	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Skala 1-100	70	N/A	N/A
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1	Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP	Persen	100	N/A	N/A

Adapun uraian dan analisis lebih lanjut mengenai capaian kinerja kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

## SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan” diukur dari satu IKK, yaitu “Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB” dengan target nilai tahun 2023 sebesar 3,16.

Pada triwulan III tahun 2023, realisasi Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB tahun 2023 masih menggunakan angka capaian tahun 2020 karena data untuk capaian tahun 2022 belum didapatkan dari Kementerian PAN RB. Dengan capaian tersebut, realisasi kinerja 2022 (yang dilaporkan di 2023) telah melebihi target tahun 2023 dan 2024 sekaligus. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2023 sama dengan realisasi kinerja tahun 2022.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja tersebut. Faktor pendukung tercapainya target kinerja adalah adanya koordinasi dengan unit kerja pemrakarsa serta koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pencapaian kinerja yang telah melebihi target tak lantas membuat berpuas diri. Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kompetensi teknis hukum seperti penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan bagi Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Diklat Fungsional Peraturan Perundang-undangan bagi Fungsional Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
- 2) Melakukan kegiatan identifikasi, analisis, pemetaan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.
- 3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.

## SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA REPUTASI BPKP

Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi berpesan bahwa tugas, fungsi, dan layanan dari pemerintah tidak hanya disampaikan, tetapi juga telah diterima oleh penggunanya, “tidak hanya *sent*, tapi juga *delivered*”. Terkait dengan hal tersebut, dalam kesempatan berbeda, Presiden juga berpesan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib membangun reputasi pemerintah, yang nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menindaklanjuti arahan-arahan Presiden tersebut, BPKP terus berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk hadir dan memberikan manfaat kepada publiknya. Atas upaya tersebut, tentu BPKP perlu mengukur bagaimana penilaian dari publiknya, untuk memastikan tidak ada *gap* antara persepsi dan ekspektasi publik terhadap BPKP, atau disebut dengan pengelolaan reputasi. Sebagai bagian dari pengelolaan reputasi yang dilakukan oleh BPKP, BPKP telah membangun Indeks Reputasi BPKP. Indeks ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi publik BPKP, atau disebut dengan masyarakat reputasi BPKP. Atas pengelolaan hubungan yang dilakukan BPKP dengan masyarakat reputasinya, BPKP telah menetapkan indikator-indikator pada setiap tahapan, yaitu tahapan *inputs*, *outputs*, *outtakes*, dan *outcomes*.

Indeks Reputasi BPKP merupakan alat ukur pada tingkatan *outcomes*, yaitu penilaian yang diberikan oleh masyarakat reputasi BPKP atas upaya pengelolaan hubungan yang telah dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan survei kepada masyarakat sasaran (masyarakat reputasi BPKP), yang terbagi menjadi masyarakat umum, media massa, kelompok atau organisasi masyarakat, dan mitra kerja BPKP. Model Indeks Reputasi BPKP memiliki empat aspek yang terdiri dari aspek Kualitas, Kinerja, Tanggung Jawab, dan Daya Tarik. Empat aspek tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 20 indikator variabel yang pada ujungnya dapat menggambarkan posisi tingkat Reputasi BPKP, yang dinilai dari skala 1 sampai dengan 7 dengan gradasi kualitas reputasi sebagai berikut: 1. *Bad* – 2. *Poor* – 3. *Sufficient* – 4. *Neutral* – 5. *Good* – 6. *Excellent* – 7. *Superior*.

Pada tahun 2023, target Indeks Reputasi BPKP adalah 76 dari skala 100 atau 5,32 dari skala 7. Pengukuran Indeks Reputasi BPKP baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Indeks Reputasi belum dapat disajikan nilainya pada triwulan III tahun 2023 (*Not Available*).

### **SASARAN KEGIATAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” diukur dari IKK “Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” dengan target nilai tahun 2023 sebesar 8,71. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi belum dapat disajikan nilainya pada triwulan III tahun 2023 (*Not Available*).

### **SASARAN KEGIATAN 4: MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN TUGAS BPKP**

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan diukur dari jumlah dokumen pendapat hukum dan dokumen penanganan perkara yang diselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan pendapat hukum dan berkas perkara yang diajukan pihak yang mengajukan komplain/gugatan kepada BPKP.

Pengukuran indikator kinerja ini baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan belum dapat disajikan nilainya pada triwulan III tahun 2023 (*Not Available*).

## SASARAN KEGIATAN 5: MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN

Pengukuran indikator kinerja ini baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan belum dapat disajikan nilainya pada triwulan III tahun 2023 (*Not Available*).

### D. CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN

Output Kegiatan sesuai dengan RKA Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 sebanyak tiga indikator output kegiatan (IOK) dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan III 2023 disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4 – Output Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi s.d. Triwulan III Tahun 2023**

No	Bagian	Satuan	Output		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Peraturan Perundang-undangan	Layanan	1	1	100%
2	Penelaahan dan Bantuan Hukum	Layanan	1	1	100%
3	Komunikasi dan Informasi	Layanan	6	6	100%
Rata-rata Capaian			8	8	100%

No	Indikator Output Kegiatan (IOK) RKA/DIPA	Satuan	Output		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	15	11	73,33%
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Laporan	30	26	86,67%
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Laporan	72	54	75,00%
Rata-rata Capaian			117	91	77,77%

Tabel 4 menunjukkan bahwa kinerja *output* layanan sudah mencapai 100% dan *output* kegiatan secara umum telah melewati target 75% pada triwulan III 2023. Faktor yang mendukung capaian kinerja *output* ini adalah kompetensi SDM yang menangani kegiatan yang telah ditargetkan serta ragam kegiatan yang turut berkontribusi terhadap kinerja. Secara umum tidak terdapat kendala yang berarti dalam mencapai target IOK.

Rincian kinerja *output* kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Indikator Output Kegiatan 1

IOK “Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan” diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. IOK ini dilaksanakan oleh Bagian 1 Peraturan Perundang-undangan.

Sampai dengan triwulan III tahun 2023 realisasi *output* sejumlah sebelas kegiatan atau mencapai 73,33% dari target tahun 2023, dengan rincian:

- 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP I  
Pada triwulan I telah dilakukan proses analisis dan *legislative drafting* atas 26 produk hukum BPKP, yang terdiri atas:
  - a) 2 (dua) *draft* Peraturan BPKP;
  - b) 18 (delapan belas) *draft* Peraturan Deputi;
  - c) 4 (empat) *draft* keputusan Kepala BPKP;
  - d) 1 (satu) *draft* Keputusan Sekretaris Utama; dan
  - e) 1 (satu) *draft* Keputusan Inspektur BPKP.
- 2) Penyusunan analisis pembahasan perjanjian/kontrak/MoU I  
Pada triwulan I telah dilakukan proses analisis dan *legal drafting* atas 12 draft MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang terdiri atas:
  - a) 5 (lima) *draft* MoU; dan
  - b) 7 (tujuh) *draft* PKS.
- 3) Penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan produk hukum BPKP  
  
Abstrak peraturan perundang-undangan adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum dikeluarkannya peraturan, dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan.  
  
Dalam triwulan I, penyusunan abstrak dilakukan terhadap 46 (empat puluh enam) Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional dan 22 (dua puluh dua) Peraturan BPKP.
- 4) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum I  
  
Kegiatan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi, menganalisis, menelaah, mengolah, memberi gambaran umum atas peraturan perundang-undangan tingkat nasional sesuai dengan Standar Pengolahan Informasi Hukum yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Permenkumham No 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta melengkapinya dengan meng-*upload* Peraturan tersebut dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPKP (JDIH BPKP). Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 telah mengelola sebanyak 112 (seratus dua belas) peraturan, yang terdiri dari 16 (enam belas) Undang-undang (UU), 35 (tiga puluh lima) Peraturan Pemerintah (PP), 45

(empat puluh lima) Peraturan Presiden (Perpres), 16 (enam belas) Keputusan Presiden (Keppres), 3 (tiga) Instruksi Presiden (Inpres).

5) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum BPKP dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum I

Kegiatan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi, menganalisis, menelaah, mengolah, memberi gambaran umum atas Peraturan BPKP sesuai dengan Standar Pengolahan Informasi Hukum yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Permenkumham No 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta melengkapinya dengan meng-*upload* Peraturan tersebut dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPKP (JDIH BPKP). Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 mengelola sebanyak 3 (tiga) Peraturan BPKP, 1 (satu) Keputusan Kepala BPKP dan 2 (dua) Surat Edaran Kepala BPKP.

6) Analisis dan deskripsi peraturan perundang-undangan I

Kegiatan analisis dan deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu memberi gambaran, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP.

7) Harmonisasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan I

Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan atas kegiatan evaluasi dan *legislative drafting* Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk mendeteksi ada/tidaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmoni, multi tafsir dan tidak efektif yang telah dilakukan selama satu semester.

8) Penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan secara tematik

Kegiatan ini menghimpun peraturan perundang-undangan berdasarkan tematik. Pada Tahun 2023, tema yang dihimpun berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri.

9) Penyusunan analisis pembahasan perjanjian/kontrak/MoU II

Pada triwulan II dan III telah dilakukan proses analisis dan legal drafting atas 32 draft MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang terdiri atas:

- a. 14 (empat belas) draft MoU; dan
- a. 18 (delapan belas) draft PKS.

10) Penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan produk hukum BPKP II

Dalam triwulan ini, penyusunan abstrak dilakukan terhadap 50 (lima puluh) Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional.

11) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum II

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 telah mengelola sebanyak 112 (seratus dua belas) peraturan, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Undang-Undang (UU), 36 (tiga puluh enam) Peraturan Pemerintah (PP), 56 (lima puluh enam) Peraturan Presiden (Perpres), 21 (dua puluh satu), Keputusan Presiden (Keppres), dan 3 (tiga) Instruksi Presiden (Inpres)

## 2. Indikator Output Kegiatan 2

IOK “Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum” diukur dengan menghitung jumlah Laporan Penelaahan Hukum dan Penanganan Bantuan Hukum yang dihasilkan. IOK ini dilaksanakan oleh Bagian 2 Penelaahan dan Bantuan Hukum.

Realisasi *output* sampai dengan triwulan III sebanyak 26 laporan atau mencapai 86,67% dari target tahun 2023 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- 1) Pendapat hukum atas pengadaan gedung *Smart Building*
- 2) Pendapat hukum terkait ganti rugi bagi korban yang mengalami Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak
- 3) Pendapat hukum terkait surat ketua harian Panitia Besar (PB) PON XX Provinsi Papua
- 4) Pendapat hukum terkait hukuman disiplin
- 5) Penanganan perkara gugatan perdata Nomor 25/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Niaga Smg di PN Semarang
- 6) Penanganan sengketa informasi publik Nomor 25/IX/KISB-PS/2022 tanggal di Komisi Informasi Publik Sumatera Barat
- 7) Penanganan sengketa informasi publik Nomor 22/V/KIP-PS/2019 di Komisi Informasi Pusat
- 8) Pendampingan terhadap pegawai BPKP yang memberikan keterangan di Kejaksaan Agung sehubungan dengan penyelidikan dugaan penyelewengan dalam tata kelola pupuk bersubsidi Tahun 2017-2022
- 9) Pendapat hukum terkait pembiayaan akomodasi hotel, transportasi, dan konsumsi untuk penyelenggaraan kegiatan ANOC *Annual General Assembly* tahun 2023 melalui APBN, surat no: HK.03/R/S-401/SU04/2/2023, tanggal 22 Mei 2023
- 10) Pendapat Hukum terkait Rencana Penugasan Audit PKKN Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I s.d. Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020, Surat No: HK.03/R/S-439/SU04/2/2023, tanggal 29 Mei 2023
- 11) Pendapat Hukum terkait Penugasan Pegawai BPKP Aktif di Komite BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, Surat No: HK.03/SR/S-454/SU04/2/2023, tanggal 31 Mei 2023
- 12) Pendapat Hukum terkait Permintaan Opini Hukum atas Penerbitan Surat Utang PT Perusahaan Pengelola Aset, Surat No: HK.03/R/S-469/SU04/2/2023, tanggal 9 Juni 2023
- 13) Pendapat Hukum terkait Permasalahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) pada Proyek Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa
- 14) Pendapat hukum terkait Permohonan Penugasan Reviu pada PT Rumah Sakit Haji Jakarta

- 15) Penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 179/Pdt.G/2022/PN.Bgr di PN Bogor
- 16) Penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Bks di PN Bekasi pada tingkat Banding
- 17) Pendampingan terhadap pegawai BPKP yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan pembangunan prasarana kereta api ringan/*light rail transit* Sumatera Selatan pada Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Bareskrim Polri (31 Mei 2023)
- 18) Pendampingan terhadap pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang dipanggil untuk memberikan keterangan di Bareskrim Polri (8 Juni 2023)
- 19) Pendapat Hukum terkait Jawaban Kepala BPKP
- 20) Pendapat Hukum terkait Peraturan Eksternal
- 21) Pendapat Hukum atas Kontrak Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2021
- 22) Masukan terkait Permintaan Opini Hukum atas Hasil Verifikasi Dokumen atas Kasus Hukum Ex RUI-Equitas pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- 23) Pendapat Hukum terkait Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah yang dibebankan pada APBD apabila dialihkan menjadi beban APBN
- 24) Penanganan perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2023/PTUN.SBY di PTUN Surabaya
- 25) Penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2023/PN.Tte di PN Ternate
- 26) Pendampingan terhadap pensiunan pegawai BPKP yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan Terdakwa atas nama Ir. Dudy Jocom di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat

### 3. Indikator Output Kegiatan 3

IOK “Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi” diukur dari jumlah Laporan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang dihasilkan. IOK ini dilaksanakan oleh Bagian 3 Komunikasi dan Informasi.

Realisasi *output* sampai dengan triwulan III sebanyak 6 layanan yang dirincikan ke dalam 54 laporan atau mencapai 75% dari target tahun 2023 dengan rincian realisasi sebagai berikut :

- 1) Layanan Informasi Publik
  - A. Laporan layanan informasi publik bulan Januari tahun 2023
  - B. Laporan layanan informasi publik bulan Februari tahun 2023
  - C. Laporan layanan informasi publik bulan Maret tahun 2023
  - D. Laporan layanan informasi publik bulan April tahun 2023

- E. Laporan layanan informasi publik bulan Mei tahun 2023
  - F. Laporan layanan informasi publik bulan Juni tahun 2023
  - G. Laporan layanan informasi publik bulan Juli tahun 2023
  - H. Laporan layanan informasi publik bulan Agustus tahun 2023
  - I. Laporan layanan informasi publik bulan September tahun 2023
- 2) Layanan Pengelolaan Pengaduan Publik
- A. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Januari tahun 2023
  - B. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Februari tahun 2023
  - C. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Maret tahun 2023
  - D. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan April tahun 2023
  - E. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Mei tahun 2023
  - F. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Juni tahun 2023
  - G. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Juli tahun 2023
  - H. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan Agustus tahun 2023
  - I. Laporan pengelolaan pengaduan publik bulan September tahun 2023
- 3) Layanan Manajemen Isu
- A. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Januari 2023
  - B. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Februari 2023
  - C. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Maret 2023
  - D. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan April 2023
  - E. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Mei 2023
  - F. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Juni 2023
  - G. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Juli 2023
  - H. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Agustus 2023
  - I. Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan September 2023
- 4) Layanan Pengelolaan Media Sosial
- A. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Januari 2023
  - B. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Februari 2023
  - C. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Maret 2023
  - D. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan April 2023
  - E. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Mei 2023
  - F. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Juni 2023
  - G. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Juli 2023
  - H. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Agustus 2023
  - I. Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan September 2023
- 5) Laporan Monitoring Website

- A. Laporan monitoring laman BPKP bulan Januari 2023
  - B. Laporan monitoring laman BPKP bulan Februari 2023
  - C. Laporan monitoring laman BPKP bulan Maret 2023
  - D. Laporan monitoring laman BPKP bulan April 2023
  - E. Laporan monitoring laman BPKP bulan Mei 2023
  - F. Laporan monitoring laman BPKP bulan Juni 2023
  - G. Laporan monitoring laman BPKP bulan Juli 2023
  - H. Laporan monitoring laman BPKP bulan Agustus 2023
  - I. Laporan monitoring laman BPKP bulan September 2023
- 6) Laporan Pengelolaan Berita Harian
- A. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Januari 2023
  - B. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Februari 2023
  - C. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Maret 2023
  - D. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan April 2023
  - E. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Mei 2023
  - F. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Juni 2023
  - G. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Juli 2023
  - H. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Agustus 2023
  - I. Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan September 2023

## E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan dana untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan triwulan III tahun 2023 disajikan pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5 – Realisasi Dana Biro Hukum dan Komunikasi s.d. Triwulan III Tahun 2023**

No	Indikator Ouput Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi Dana		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	330.872.000	214.529.200	64.83
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	919.248.000	531.070.954	57.77
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.528.835.000	923.607.024	60.41
<b>Jumlah</b>		<b>2.778.955.000</b>	<b>1.669.207.178</b>	<b>60.07</b>

Dari total anggaran sebesar Rp2.778.955.000, realisasi belanja sebesar Rp1.669.207.178 atau sebesar 60.07%. Melihat data realisasi, hal yang menghambat

penyerapan anggaran belum sesuai dengan *progress* triwulan yang di kisaran 75% karena masih terdapat pembayaran yang *outstanding*. Pembayaran yang masih *outstanding* tersebut adalah untuk kegiatan *Workshop* Media Komunikasi Berbasis Data dalam Pengelolaan Branding Organisasi, dimana kegiatannya sudah terlaksana di triwulan III 2023.

Untuk memastikan penyerapan anggaran sesuai dengan yang ditargetkan di tahun 2023, maka rencana tindaknya adalah pada periode triwulan IV akan disusun target penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun sebagai bahan monitoring bulanan.

## F. PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Realisasi penggunaan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan triwulan III 2023 disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6 – Realisasi Penggunaan SDM Biro Hukum dan Komunikasi s.d. Triwulan III Tahun 2023**

No	Indikator Ouput Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi Dana		
		Rencana (OH)	Realisasi (OH)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	2.600	2.000	76.92
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	3.400	2.715	79.88
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5.857	4.479	76.47
<b>Jumlah</b>		<b>11.857</b>	<b>9.194</b>	<b>77.54</b>

Realisasi penggunaan SDM Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 9.194 OH dari target 2023 sebesar 11.857 OH atau 77.54%. Hal ini menunjukkan bahwa target penggunaan OH pada triwulan III sebesar 75% sudah tercapai.

Faktor yang mendukung realisasi kinerja ini adalah kompetensi SDM yang menangani kegiatan yang telah ditargetkan serta ragam kegiatan yang turut berkontribusi terhadap kinerja. Secara umum tidak terdapat kendala yang berarti dalam mencapai target penggunaan SDM.

Untuk menganalisis efisiensi, indikator yang digunakan adalah dengan membandingkan sumber daya yang digunakan (*input*) dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan. Dari perspektif penggunaan dana, terlihat terdapat *gap* antara dana yang telah diserap 60,07% pada Tabel 5) dengan capaian Indikator Output Kegiatan sebesar 77,77% (pada Tabel 4). Dari perbandingan tersebut, penggunaan dana dapat dikatakan efisien karena capaian output kegiatan lebih besa dari input yang digunakan. Walaupun demikian, hal ini bukan merupakan efisiensi yang sangat baik, dikarenakan anggaran tidak sepenuhnya direpresentasikan dengan IOK.

Dari perspektif penggunaan sumber daya manusia, terlihat bahwa realisasi penggunaan SDM (Tabel 6) sebesar 77,54% lebih kecil dibandingkan dengan keluaran kegiatan (capaian IOK pada Tabel 4) yang mencapai 77,77%. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif penggunaan SDM telah efisien.

## H. AGENDA PRIORITAS ENABLER PENGAWASAN

Biro Hukum dan Komunikasi bertanggung jawab untuk mengelola risiko hukum dan reputasi. Kondisi yang diharapkan adalah terlindunginya pengawasan BPKP dari risiko hukum dan reputasi

### 1. Risiko hukum dan reputasi

Kondisi yang diharapkan adalah terlindunginya pengawasan BPKP dari risiko hukum dan reputasi

Kondisi s.d. Tw III tahun 2023:

- Telah ada Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di lingkungan BPKP sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan
- Telah ada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-310/K/SU/2021 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi BPKP sebagai pedoman dalam pengelolaan reputasi BPKP
- Telah ada keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.01.01/KEP-477/SU/04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Proteksi Hukum bagi Satgas Pengelolaan Reputasi di Lingkungan BPKP
- Telah ada Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.01.01/KEP-477/SU/04/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Proteksi Hukum bagi Satgas Pengelolaan Reputasi di Lingkungan BPKP
- Telah melaksanakan internalisasi peningkatan efektivitas pengelolaan reputasi BPKP bagi unit kerja pada 3 Agustus 2023 sesuai surat Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor HM.00/UND-645/SU04/3/2022 tanggal 2 Agustus 2023
- Menyusun SE Sekretaris Utama tentang Efektivitas Peran Tim Teknis Proteksi Hukum dan Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Unit Kerja untuk Meningkatkan

## Kepercayaan Publik Terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- Menyusun draf perbaikan SOP penelaahan dan Bantuan Hukum dalam meningkatkan proteksi hukum atas tugas pengawasan.

### Rencana Aksi Triwulan IV

- Melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait risiko hukum dalam tugas pengawasan secara langsung
- Melakukan pemutakhiran risiko hukum dan dilakukan pemantauan pelaksanaan RTP atas risiko hukum yang teridentifikasi
- Mengefektifkan peran Tim Proteksi Hukum Unit Kerja, antara lain dengan memberikan saran berupa pelibatan semua bidang dalam Tim Proteksi Hukum Unit Kerja
- Pemberian bantuan hukum atas komplain/gugatan terhadap BPKP, pemberian pendapat hukum, pemberian pendapat hukum, pemberian konsultasi hukum, dan pendampingan hukum terhadap pegawai BPKP yang dipanggil sebagai saksi/ahli di hadapan penyidik/pengadilan Tipikor
- Mengevaluasi peraturan perundang-undangan untuk mendeteksi ada/tidaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonisasi dan tidak efektif.
- Melakukan koordinasi dengan Biro SDM dan Pusdiklatwas terkait diklat untuk peningkatan kompetensi identifikasi risiko hukum dan peningkatan branding BPKP
- Melakukan Sosialisasi SE Sekretaris Utama tentang Efektivitas Peran Tim Teknis Proteksi Hukum dalam Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Unit Kerja Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas Efektivitas Peran Tim Teknis Proteksi Hukum dalam Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Unit Kerja.
- Finalisasi perbaikan SOP Penelaahan dan Bantuan Hukum dalam meningkatkan proteksi hukum atas tugas pengawasan.

### Progres Tw III dan IV s.d. 3 Agustus tahun 2023

- Telah dilaksanakan sosialisasi dan internalisasi terkait risiko hukum dalam tugas pengawasan secara daring pada tanggal 3 Agustus 2023
- Telah melakukan pemutakhiran risiko hukum dan dilakukan pemantauan pelaksanaan RTP atas risiko hukum yang teridentifikasi pada bulan Juli 2023
- Mengefektifkan peran Tim Proteksi Hukum Unit Kerja melalui zoom meeting Internalisasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Reputasi BPKP
- TW III telah dilakukan: Pemberian bantuan hukum atas komplain/gugatan terhadap bPKP sebanyak 1 perkara baru, 3 pendapat hukum, 3 pemberian konsultasi hukum, dan 1 pendampingan hukum terhadap pegawai/pensiunan pegawai BPKP yang dipanggil sebagai saksi/ahli dihadapkan penyidik/pengadilan Tipikor.

- TW III telah melakukan kegiatan legislative drafting atas 2 rancangan Peraturan BPKP dan 4 rancangan Peraturan Deputi Kepala BPKP
- Sedang melakukan koordinasi dengan Pusdiklatwa dan Biro SDM

#### Akumulasi Progress Tahun 2023 (Awal Tahun – Triwulan III)

- Telah dilaksanakan sosialisasi dan internalisasi terkait risiko hukum dalam tugas pengawasan secara daring pada tanggal 3 Agustus 2023
- Telah melakukan pemutakhiran risiko hukum dan dilakukan pemantauan pelaksanaan RTP atas risiko hukum yang teridentifikasi pada bulan Juli 2023
- Mengefektifkan peran Tim Proteksi Hukum Unit Kerja melalui zoom meeting Internalisasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Reputasi BPKP
- Sampai dengan Bulan Agustus telah dilakukan: Pemberian bantuan hukum atas komplain/gugatan terhadap BPKP sebanyak 8 perkara baru, 20 pendapat hukum, 14 pemberian konsultasi hukum, dan 7 pendampingan hukum terhadap pegawai/pensiunan pegawai BPKP yang dipanggil sebagai saksi/ahli dihadapan penyidik/pengadilan Tipikor
- Sampai dengan Bulan Agustus telah melakukan kegiatan legislative drafting atas 7 rancangan Peraturan BPKP dan 41 rancangan Peraturan Deputi Kepala BPKP
- Sedang melakukan koordinasi dengan Pusdiklatwas dan Biro SDM

#### GAP

- Pengampu risiko hukum dan reputasi pada unit kerja belum ditetapkan secara formal, perlu dilakukan monitoring untuk setiap unit kerja
  - Belum seluruh unit kerja memahami pentingnya proteksi hukum atas penugasan pengawasan
  - Terbatasnya sumber daya pada Bagian Hukum
2. Kondisi yang diharapkan : terlindunginya pengawasan BPKP dari risiko hukum dan reputasi

#### Kondisi saat ini s.d. triwulan III

- Capaian indeks reputasi pwk pada kisaran 4-5, sedangkan di BPKP pada skala 7
- Pelaksanaan proteksi dan branding pada unit kerja perwakilan diatur dalam SK Kepala BPKP Tahun 2021 tentang Satgas Pengelolaan Reputasi, yang masa berlakunya hingga 2024. Secara fungsi, pada unit kerja perwakilan belum diatur pelaksana pengelolaan reputasi sehingga berpengaruh terhadap penanggungjawab dan penganggaran yang berdampak terhadap ketercapaian indeks reputasi.
- Program, kegiatan, dan target kinerja pada unit kerja sudah diatur dalam BPKP SPIK yang ditetapkan pada SE Sesma
- Telah dilaksanakan workshop komunikasi efektif bagi Pimpinan bekerjasama dengan Humas Indonesia pada 17-18 Juli 2023 terhadap 34 Kepala Perwakilan dan 1 Kapusdiklatwas

- Telah dilakukan internalisasi peningkatan efektivitas pengelolaan reputasi BPKP bagi unit kerja pada 3 Agustus 2023 sesuai surat Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor HM.00/UND-645/SU04/3/2022 tanggal 2 Agustus 2023
- Telah dilakukan workshop media komunikasi berbasis data dalam pengelolaan branding organisasi, tanggal 7-8 September 2023

#### Rencana Aksi Tw IV

- Meletakkan tugas dan fungsi pengelola reputasi unit kerja pada SOTK, sehingga menjamin keberlangsungan program dan penganggaran
- Mengoptimalkan peran pranata humas dalam branding BPKP terutama pada unit kerja
- Mengoptimalkan peran pranata Humas dalam branding BPKP terutama pada unit kerja BPKP seluruh Indonesia
- Melakukan pengukuran indeks reputasi organisasi

#### Progress Tw III dan IV (s.d. 3 Agustus 2023)

- Workshop Komunikasi Efektif bagi Pimpinan bekerja sama dengan Humas Indonesia pada 17-18 Juli 2023 terhadap 34 Kepala Perwakilan dan Kapusdiklatwas.
- Internalisasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Reputasi BPKP bagi unit kerja pada 3 Agustus 2023 sesuai surat Kepala Biro Hukum dan Komunikasi nomor HM.00/UND-645/SU04/3/2022 tanggal 2 Agustus 2023

#### Kendala/Permasalahan dan Strateginya

Lamanya penerbitan No Objection Letter program Multi Donor Trust Fund sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan pimpinan dan pengelola reputasi unit kerja. Untuk itu, bagian Kominfo Rokumasi secara intens berkoordinasi dengan Pusbin JFA agar kegiatan dapat lancar disetujui

Sejauh ini belum dijumpai kendala yang signifikan. Tantangan ke depan adalah pengukuran indeks reputasi dimana pada tahun ini terdapat beberapa penyesuaian parameter

#### Akumulasi Progress Tahun 2023 (awal tahun – triwulan III)

- Sertifikasi Public Relations bekerja sama dengan LSPPRI pada 22-24 Februari 2023 (Surat Penetapan Kepala Biro SDM BPKP no. DL.04.00/S-166/SU04/3/2023 tanggal 6 Februari 2023)

Selain kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, sepanjang periode triwulan III tahun 2023 Biro Hukum dan Komunikasi juga memperoleh penghargaan-penghargaan dari pihak eksternal, yaitu:

1. *Bronzer Winner* kategori Laporan Tahunan Sub Kategori *Annual Report* dari PR Indonesia.
2. *Silver Winner* kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial Instagram.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro,

Azwad Zamroddin Hakim

Tembusan Yth.:  
Sekretaris Utama BPKP (sebagai laporan)